



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

PARTISIPASI TERGERUS KONSOLIDASI ELITE

Catatan Akhir Tahun 2019

*Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PSHK)*

6 ISU HUKUM 2019

Kelembagaan

Penegakan
Hukum

Legislasi

Amendemen
Konstitusi

Peradilan

Pemberantasan
Korupsi

DINAMIKA KELEMBAGAAN DI 2019

Kontestasi Partai Politik dalam Pemilu tidak berhasil menciptakan Parlemen yang merepresentasikan keragaman masyarakat Indonesia.

Konsolidasi politik pasca Pemilu menguatkan oligarki, karena tidak menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang saling mengawasi dan mengimbangi

penambahan pimpinan MPR melalui UU MD3

pengisian Menteri dan Wakil Menteri

Munculnya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD yang akan menguntungkan partai politik dan menguatkan posisi elite terhadap masyarakat

Perubahan kelembagaan dan pengisian jabatannya dilakukan hanya untuk kepentingan elite

pengisian jabatan lembaga disekitar Presiden

pengisian Jabatan Pimpinan KPK yang abai terhadap aspirasi publik

Tantangan Kelembagaan 2020

```
graph LR; A[Tantangan Kelembagaan 2020] --> B[Tantangan terhadap kehidupan demokrasi di daerah melalui Pemilukada]; A --> C[Potensi Perubahan struktur kelembagaan dan pengisian jabatan yang akan menguntungkan elite politik]; C --> D[Pembentukan KASN dalam RUU Perubahan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN]; C --> E[RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial]; C --> F[Pengisian Hakim MK dan Hakim Agung];
```

Tantangan terhadap kehidupan demokrasi di daerah melalui Pemilukada

Potensi Perubahan struktur kelembagaan dan pengisian jabatan yang akan menguntungkan elite politik

Pembentukan KASN dalam RUU Perubahan UU 5 Tahun 2014 tentang ASN

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial

Pengisian Hakim MK dan Hakim Agung

DINAMIKA PENEGAKAN HUKUM DI 2019

Penegakan hukum dalam tahun politik dijadikan sebagai alat politik kekuasaan. Hanya tegas terhadap isu-isu yang mengancam pemegang kekuasaan.

Tidak terealisasinya komitmen Pemerintah menuntaskan pelanggaran HAM masa lalu, kasus pembunuhan Munir, dan kasus penyiraman Novel Baswedan yang mendapat perhatian publik dan menjadi janji kampanye Presiden Joko Widodo.

Kriminalisasi terhadap hak kebebasan berekspresi dan hak berserikat dan berkumpul masyarakat menggunakan UU ITE atau KUHP

Penegakan hukum di 2019 masih menggunakan pendekatan represif yang menimbulkan korban dan kerugian materiil dan imateriil di masyarakat

TANTANGAN PENEKAKAN HUKUM 2020

Penegakan hukum akan semakin represif karena elite semakin terkonsolidasi untuk mengamankan kepentingan.

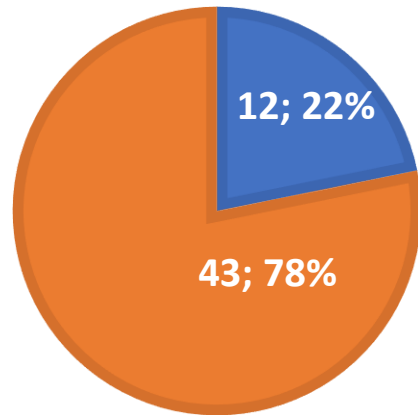
Penuntasan pelanggaran HAM masa lalu, kasus pembunuhan Munir, dan kasus penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan **belum akan terungkap** sepanjang tidak ada tindak lanjut yang terukur dari proses yang sudah berjalan sebelumnya

Masih akan terjadi kriminalisasi terhadap hak kebebasan berekspresi dan hak berserikat dan berkumpul

CATATAN LEGISLASI 2019

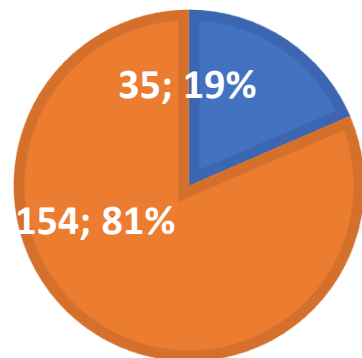
PROLEGNAS 2019

■ Disahkan ■ Tidak Disahkan



PROLEGNAS 2014-2019

■ Disahkan ■ Tidak Disahkan



UPAYA REFORMASI REGULASI 2019

Kelembagaan

- pelembagaan reformasi regulasi yang kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan badan tunggal regulasi

Simplifikasi

- pengusulan *Omnibus Law* sebagai langkah akselerasi pemerintah dalam menata regulasi, penyederhanaan (simplifikasi), dan kemudahan prosedur terutama di sektor investasi

Revisi UU 12/2011

- dimungkinkannya *carry over* pembahasan RUU kepada keanggotaan DPR periode berikutnya, berdasarkan kesepakatan bersama DPR, Presiden, dan/atau DPD (Pasal 71A); dan
- pemantauan dan peninjauan terhadap pelaksanaan UU oleh DPR, DPD, dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh DPR (Pasal 95A).

TANTANGAN LEGISLASI DI 2020

Kegagalan memenuhi target Prolegnas berpotensi terulang, mengingat jumlah RUU dalam Prolegnas 2020-2024 sebanyak 248 RUU dan Prioritas 2020 50 RUU masih terbilang banyak.

Prolegnas 2020 masih akan memprioritaskan jumlah yang banyak, karena masih menggunakan sistem “jatah” 2 (dua) RUU per Komisi, ditambah mengakomodasi usulan RUU yang datang dari fraksi dan anggota.

Potensi *deadlock* terhadap pembahasan sejumlah RUU.

Kinerja legislasi di awal 2020 akan terfokus kepada pembahasan paket RUU *Omnibus Law*

Ide badan tunggal regulasi tenggelam oleh dinamika pembahasan paket RUU *Omnibus Law* yang kemudian mengakibatkan program reformasi regulasi tidak berjalan efektif dan terkendali.

RUU dengan Pengaturan Diluar Materi Muatan UU dalam Prolegnas 2020-2024

RUU tentang Perlindungan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri

RUU tentang Persepakbolaan

RUU tentang RUU tentang Anti-Propaganda Penyimpangan Seksual

RUU tentang Pengasuhan Anak

RUU Sistem Perekonomian Nasional

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran ; RUU tentang Pendidikan Kedokteran Hewan

RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi ; RUU tentang Pendidikan Tinggi Agama Islam

RUU tentang Fasilitas Sarana Prasarana Pendidikan

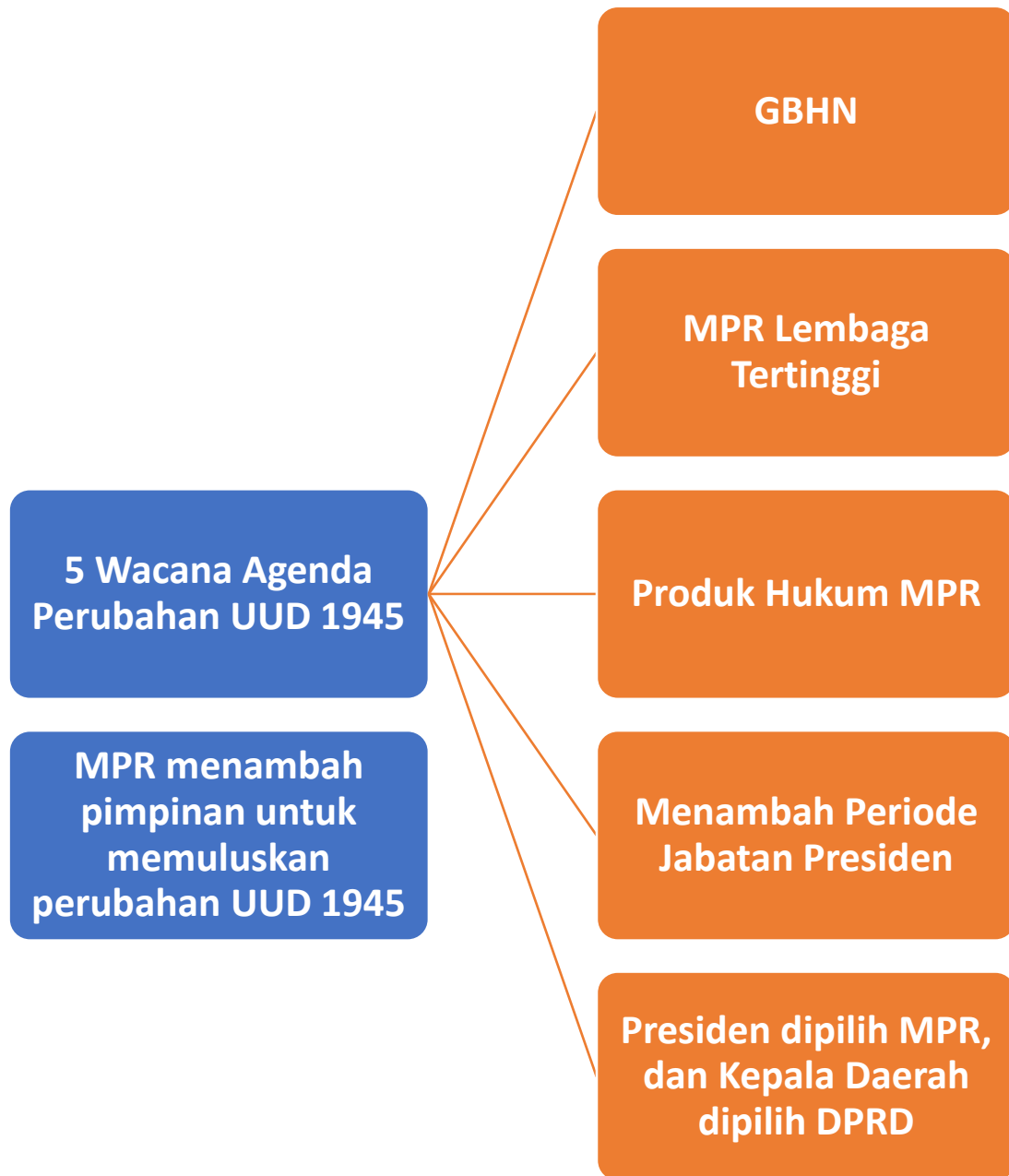
RUU tentang Pemberdayaan Anak Yatim dan Anak Terlantar Negara

RUU tentang Analisa Mengenai Dampak Sosial

RUU tentang Komisi Nasional Perlindungan Lingkungan Hidup

RUU tentang Sistem Transportasi Nasional ; RUU tentang Transportasi Daring

WACANA AMENDEMENTEN KONSTITUSI DI 2019



Alasan:

1. Bukan agenda rakyat
2. Merusak sistem ketatanegaraan
3. Memunculkan praktik Orla & Orba

PROYEKSI WACANA AMENDEMENT KONSTITUSI DI 2020

MPR

- Agenda Amandemen akan terus berlanjut
- Safari politik dilakukan untuk mencari legitimasi
- Merangkul parpol yang belum setuju
- Mengabaikan suara rakyat

Masyarakat

- Akan ada Gerakan menolak Amendemen Konstitusi
- Perlu membangun gagasan akademik dan menjadikannya sebagai agenda rakyat
- Perubahan harus memperbaiki sistem ketatanegaraan
- Perubahan tidak mengulang sejarah

DINAMIKA PERADILAN DI 2019

MA dan MK mengeluarkan sejumlah kebijakan peningkatan akses terhadap peradilan dengan pendekatan teknologi untuk peningkatan pelayanan dalam peradilan.

Perbaikan dalam aspek prosedural tidak diimbangi dengan perbaikan integritas sumber daya manusia.

TANTANGAN PERADILAN DI 2020

Peradilan harus mampu menjadi pihak yang melakukan koreksi terhadap peraturan yang dihasilkan oleh Presiden dan DPR.

Untuk meningkatkan kepercayaan publik, maka peradilan harus mampu meningkatkan integritas sumber daya manusianya dan menciptakan sistem tata kelola yang akuntabel dan transparan.

Optimalisasi implementasi kebijakan prosedur peradilan berbasis teknologi, untuk meningkatkan akses publik terhadap peradilan.

Optimalisasi peran KY untuk membangun lembaga yudikatif yang lebih bermartabat dan integritas.




2019
Puncak
pelemahan
KPK

KPK dan Pemberantasan Korupsi

- Konsistensi dukungan publik terhadap KPK dan gerakan pemberantasan korupsi
- Pengungkapan kasus korupsi oleh KPK
- Pengungkapan kasus teror pegawai KPK yang tidak berhasil diusut
- Upaya pelemahan terus berlangsung secara sistematis
- Proses pemilihan pimpinan KPK dan revisi UU KPK merupakan puncak pelemahan yang berhasil
- Dukungan politik semu terhadap eksistensi KPK

- Gerakan antikorupsi menghadapi tantangan besar berupa kekuatan politik oligarki yang semakin kuat
- Fungsi penindakan KPK yang semakin lemah
- *Political will* rendah dalam mendukung penguatan KPK dan pemberantasan korupsi, salah satu indikasi terlihat dari materi revisi UU Pemasyarakatan yang mengatur kebijakan remisi yang lebih mudah didapatkan oleh terpidana korupsi



Kekuatan publik
dalam melakukan
pemberantasan
korupsi di 2020

5 REKOMENDASI PSHK

- Perkuat gerakan masyarakat untuk mengontrol setiap kebijakan Pemerintah.
- Pemerintah dan DPR harus membuka ruang partisipasi publik dalam pembentukan peraturan dan kebijakan.
- Pembangunan harus berjalan dengan berbasis kepada nilai HAM, antikorupsi, dan lingkungan.
- Tidak mengistimewakan kelompok pemodal yang hanya akan menciptakan segregasi yang semakin dalam ditengah masyarakat.
- Pemerintah harus meninggalkan pendekatan represif dalam penegakan hukum.



PSHK
Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

TERIMA KASIH



PSHK

Pusat Studi Hukum &
Kebijakan Indonesia

2019